



DOKUMEN

PEMBELAJARAN PELAKSANA KEGIATAN PAKET 6

Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat

MARET 2022

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
BAB 1 Informasi Ringkas Organisasi dan Proyek	4
BAB 2. Perencanaan Kegiatan	5
1. Pendahuluan dan Latar Belakang	5
2. Tujuan dan Sasaran proyek	6
a. <i>Tujuan</i>	6
b. <i>Sasaran</i>	6
c. <i>Ruang Lingkup Pekerjaan di dalam pelaksanaan proyek</i>	7
d. <i>Metodologi saat perencanaan proyek</i>	7
BAB 3. Pelaksanaan Kegiatan	12
1. Set up SDM pengelola proyek dan posisi kantor lapangan	12
2. Monitoring dan evaluasi internal untuk membangun tata hubungan koordinasi dan komunikasi pelaksana proyek di lapangan	13
3. Mengawal Dinamika Capaian Kegiatan dan Penyelesaian Laporan	15
BAB 4. Catatan Pembelajaran	19
1. Dinamika kelompok dalam penguatan kelembagaan	19
2. Penguatan Kemitraan	20
3. Dukungan Kebijakan Daerah untuk Praktik RBFM	20
4. Pentingnya Akses dan Pengakuan KMHA dalam Perikanan Berkelanjutan	21
BAB 5. Kesimpulan dan Penutup	22

Daftar Gambar

Gambar 1. Pendekatan Usulan Program.....	8
Gambar 2. Outcome Kegiatan Paket 6	12
Gambar 3. Outcome 1 Paket 6	15
Gambar 4. Outcome 2 Paket 6	17
Gambar 5. Outcome 3 Paket 6	17
Gambar 6. Tantangan dan Pembelajaran dari Pelaksanaan Paket 6	19

BAB 1

Informasi Ringkas Organisasi dan Proyek

Nama Proyek: <i>Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat.</i>	
Durasi Proyek:	Agustus 2020 – Maret 2022
Lokasi Proyek/Kegiatan	TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat
Total Hibah Dari ICCTF	USD. 598.000,-
Dana hibah yang sudah diterima	Rp. 7.830.615.596,-
Dana hibah ICCTF yang sudah digunakan	Rp. 8.423.982.391 ,-
Jumlah penerima manfaat langsung	Kurang lebih 500 orang yang terlibat dalam pertemuan (masyarakat adat, forum adat, dinas terkait dan lokasi di pilot site)
Jumlah penerima manfaat tidak langsung	2 desa di Kabupaten Rote Ndao (lebih kurang 600 KK) dan 1 kampung di SAP Kepulauan Raja Ampat (lebih kurang 98 KK)
Nama organisasi	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
Direktur	Iwan Setiawan
Program Manager	Evi Indraswati

BAB 2.

Perencanaan Kegiatan

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Hasil monitoring sesuai Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K) oleh Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Kepmen. KKP No. 6/Kepmen-KP/ 2014 tentang rencana pengelolaan dan zonasi Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dan sekitar di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2034, menunjukkan bahwa tekanan dan praktik yang merusak telah berdampak pada kelestarian ekosistem laut dangkal di TNP Laut Sawu (terutama mangrove, lamun dan terumbu karang), dengan tingkat kerusakan rata-rata mencapai 70%. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), kondisi pemanfaatan berlebihan (untuk ikan karang, udang penaeid, kepiting, dan cumi-cumi) telah terjadi di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao.

Kondisi ekologis perairan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat yang terletak Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat masih tergolong baik. Warga dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat saat ini mengandalkan wisata bahari sebagai tulang punggung sektor ekonomi dan pembangunan wilayah. Keanekaragaman hayati yang tinggi dan pemandangan alam yang luar biasa menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat.

Karakteristik fisik perairan Kepulauan Raja Ampat amat mendukung biota perairan khususnya terumbu karang karena kedalaman perairan yang relatif dangkal, kejernihan air, dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Lokasi perairan Kepulauan Raja Ampat yang berada pada kawasan perairan bebas (cukup jauh dari daratan) diduga menyebabkan pengaruh bahan-bahan tersuspensi yang berasal dari aktivitas daratan sangat kecil.

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di kampung-kampung sekitar Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat hampir sama dengan mata pencaharian penduduk di pulau-pulau kecil lainnya yaitu sebagai nelayan. Mata pencaharian sampingan dengan berkebun atau mengumpulkan hasil hutan di sekitar kampung. Hasil tangkapan ikan utamanya untuk konsumsi keluarga. Wilayah tangkap nelayan biasanya hanya di perairan dan pulau-pulau sekitar kampung. Di beberapa kampung terdapat Lembaga

Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pembentukannya difasilitasi oleh Coremap II Raja Ampat.

Kegiatan ini akan memperkuat penerapan konsep “wilayah penangkapan ikan” oleh dan untuk kelompok masyarakat (khususnya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau KMHA) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (percontohan di Kabupaten: Rote Ndao) dan Provinsi Papua Barat (percontohan di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat) sebagai pelaku penting bagi pengembangan kemitraan konservasi TNP Laut Sawu (TNP-LS) dan SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA) secara berkelanjutan.

Selama proses pelaksanaan kegiatan ini tentunya banyak pembelajaran proyek yang didapatkan serta menambah pengetahuan dan juga memerlukan modifikasi pendekatan dari perencanaan yang sudah dituliskan dalam *logical framework*. Kendala dan tantangan menjadi kunci keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan proyek ini diharapkan menjadi hikmah pembelajaran untuk merencanakan kegiatan serupa yang lebih baik lagi.

2. Tujuan dan Sasaran proyek

a. Tujuan

Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat (*indigenous people right*) di wilayah TNP-LS, Provinsi NTT dan SAP-KRA, Provinsi Papua Barat.

b. Sasaran

1. Menguatnya kelembagaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu (TNP-LS) dan SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA).
2. Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA).
3. Implementasi rencana pengelolaan RB-SFM di wilayah kabupaten sasaran.
4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan proyek.
5. Terselenggaranya tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek.

c. Ruang Lingkup Pekerjaan di dalam pelaksanaan proyek

Lingkup kegiatan ini, mencakup:

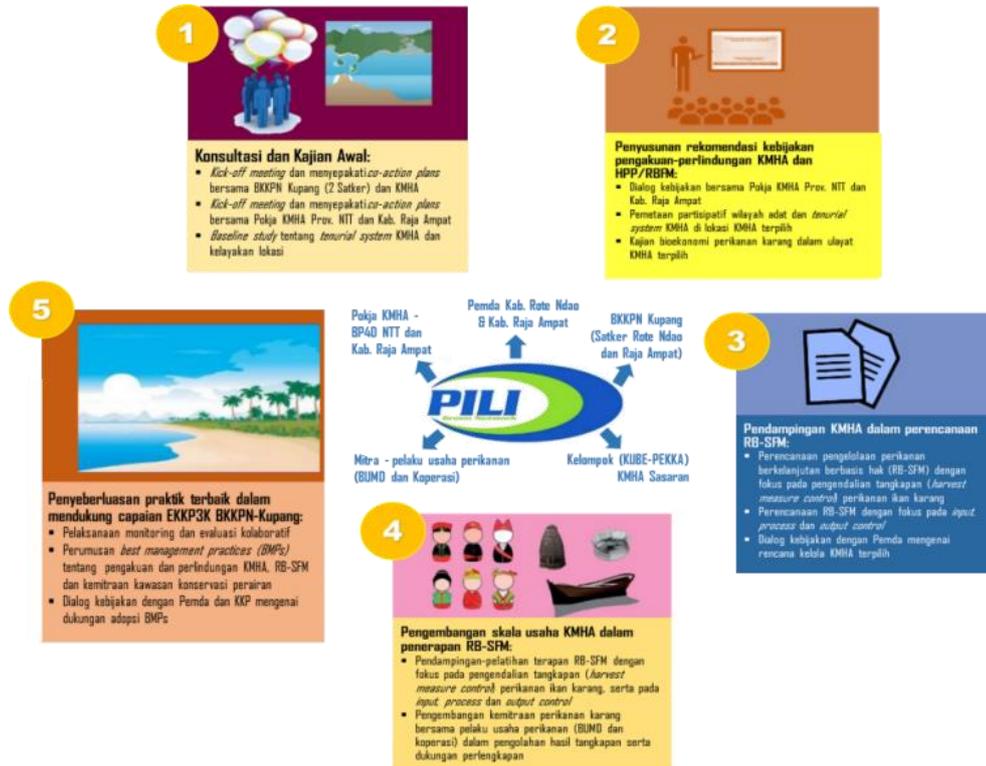
1. Penguatan dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi di 2 lokasi sasaran terhadap pengakuan dan perlindungan *tenurial system* KMHA.
2. Pelaksanaan kajian ekonomi dan biologi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan *input, output* dan *process control*.
3. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (*Right-based Sustainable Fisheries Management* atau RB-SFM).
4. Pengembangan kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan.
5. Penguatan kapasitas KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM.
6. Pengembangan pembelajaran dari *pilot activities* di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk *Best Management Practices* (BMPs).
7. Koordinasi dengan pemda dan pelaku lainnya dalam pengembangan pembelajaran dari *pilot activities* di TNP-LS dan SAP-KRA.
8. Terselenggaranya manajemen dan tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek.
9. Penguatan sistem manajemen proyek, kelengkapan tim pelaksana, dan sarana-prasarana kerja di 2 lokasi sasaran dalam mencapai target rencana proyek.
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan periodik.

d. Metodologi saat perencanaan proyek

Adapun strategi pendekatan yang dijalankan saat perencanaan proyek ini didesain atau disusun:

- A. Upaya legalisasi nilai-nilai tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir di TNP-LS dan SAP-KRA telah dilakukan oleh pemerintah melalui alokasi ruang kelola dalam “zona lainnya” yaitu “sub zona kearifan lokal” sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2034, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034. Agar kebijakan tersebut dapat efektif terlaksana di

lapangan, usulan program ini secara ringkas menempuh pendekatan sebagaimana ilustrasi di bawah ini:



Gambar 1. Pendekatan Usulan Program

B. Tahapan identifikasi dan pemetaan awal keberadaan KMHA hingga tahapan pencapaian kemandirian kelembagaan KMHA serta pelaksanaan Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguard Framework/ESSF*), diuraikan dalam metodologi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Pemetaan

Kejelasan wilayah kelola adat (spasial dan karakter aset penghidupan berkelanjutan atau *sustainable livelihood assets*) dari KMHA di Kabupaten Rote Ndao (TNP-LS) serta KMHA di Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat (SAP- KRA), akan dibangun dengan:

a. Pelaksanaan Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESSF- Fase Restrukturisasi Kedua) untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial

yang mungkin terjadi karena pelaksanaan proyek. Pada tahap awal yayasan PILI melakukan screening awal keberadaan masyarakat adat.

- b. Kajian dan pemetaan partisipatif, musyawarah adat, dan penetapan “deliniasi makro dan mikro” ruang laut dan pesisir dalam wilayah kelola adat melalui kesepakatan musyawarah KMHA (termasuk perempuan adat) dan kebijakan pimpinan adat, didampingi pengambil kebijakan desa/kampung, kecamatan/distrik, kabupaten, provinsi, serta pihak BKKPN Kupang. Kajian melalui FGD, diskusi dan sosialisasi sesuai dengan prinsip Free, Prior, Informed, and Consultation (FPIC) kepada masyarakat adat yang terkena dampak proyek, baik dampak negatif maupun positif (masyarakat adat sebagai penerima manfaat);
- c. Pematangan dokumen rekognisi kebijakan wilayah kelola laut KMHA dalam serial pembelajaran *shared-learning* dan dialog kebijakan Kelompok Kerja KMHA Provinsi NTT (Kabupaten Rote Ndao) dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Raja Ampat) bersama kebijakan desa/kampung, kecamatan/distrik, kabupaten, provinsi, serta pihak BKKPN Kupang; yang diperkuat dengan perumusan kajian dan naskah akademis.

2. Pendampingan Kearifan Lokal KMHA dalam Tata Kelola Perikanan

Keberadaan KMHA dengan ruang kelola adat laut dan pesisir yang sah (*legitimate*), akan menjadi dasar perumusan rencana pengelolaan (*management plan*) sumber daya pesisir dan ikan karang, melalui:

- a. Penyusunan basis data, kajian dampak sosial dan dampak ekonomi, serta kecenderungan kondisi ekosistem pesisir dan (khususnya sumber daya perikanan karang) dengan melaksanakan serangkaian kajian partisipatif.
- b. Pematangan dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan perikanan berkelanjutan oleh unit usaha KMHA dalam lokakarya adat yang diperkuat dengan peraturan adat dan kajian akademis;
- c. Penguatan rekognisi rencana kelola sumber daya pesisir dan perikanan berkelanjutan berbasis ulayat KMHA melalui serial pembelajaran bersama (*shared-learning*) dan dialog kebijakan yang dilengkapi dengan perumusan serial modul pembelajaran kebijakan.
- d. Implementasi rencana kelola sumber daya pesisir dan perikanan berkelanjutan berbasis ulayat KMHA melalui seleksi *pilot activities* dalam musyawarah adat,

yang diperkuat dengan penyusunan kajian kelayakan, kajian dampak lingkungan, kajian bio-ekonomi, perumusan serial modul pembelajaran, pelaksanaan pelatihan teknis, uji coba lapangan, serta monitoring dan evaluasi hasil ujicoba dalam memperoleh praktik-praktik terbaik tata kelola perikanan karang (*best management practices* atau BMPs).

3. Penguatan kelembagaan

Serial dialog kebijakan bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan KMHA untuk mendorong:

- a. Pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat KMHA dan rekognisi wilayah kelola laut dan pesisir KMHA dalam kebijakan tata ruang dan kebijakan pembangunan desa/kampung, atau kecamatan/distrik, atau kabupaten, atau provinsi.
- b. Rekognisi rencana pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management plan*) KMHA (melalui rencana kelola kelompok masyarakat) sebagai unit usaha KMHA atas sumber daya perikanan karang dan kuota tangkapan ikan dan hasil laut lainnya berbasis *tenurial system* ulayat adat (KMHA) serta pengelolaan perikanan berdasarkan konsep HPP atau RBFM. Kelompok masyarakat yang telah difasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompoknya yaitu KUB (Kelompok Usaha Bersama), Pokdakan (Kelompok Budidaya Perikanan), Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran) dan Pokmaswas (Kelompok Pengawas melalui Manaholo/Pengawas Adat).
- c. Penguatan kolaborasi konservasi TNP-LS dan SAP-KRA, melalui kerjasama usaha antara kelompok masyarakat (Pokmas) dengan pelaku industri untuk mendukung keberlanjutan *pilot activities* dalam adopsi teknologi budidaya perikanan karang, serta pengembangan rantai pasok berkelanjutan (*sustainable supply chain*).

4. Kemandirian kelembagaan

Pengembangan lebih lanjut dari kerjasama teknis rantai pasok berkelanjutan bersama pelaku industri perikanan di NTT dan Papua Barat akan diperkuat melalui:

- a. Pengembangan kapasitas teknis sumber daya manusia perikanan dalam unit usaha Pokmas KMHA.

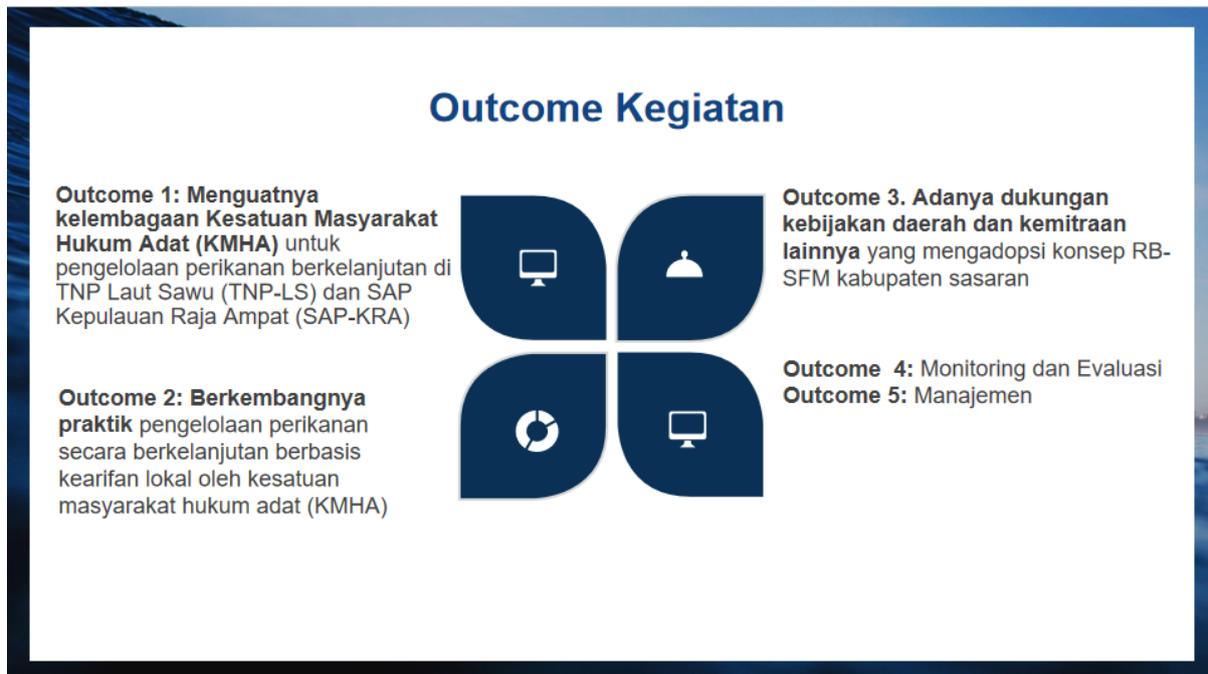
- b. Rekognisi rencana kerja pengembangan *sustainable fisheries* oleh Pokmas dalam program pembangunan sektor perikanan dan kelautan level kabupaten dan provinsi.
- c. Fasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan budidaya perikanan karang dan teknologi pasca panen.
- d. Penguatan jejaring pemasaran produk perikanan berkelanjutan berbasis pengembangan unit usaha Pokmas melalui bekerjasama dengan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Kabupaten Rote Ndao dan pelaku industri perikanan di NTT dan Papua Barat.
- e. Fasilitasi pendampingan pengembangan standarisasi produk perikanan KMHA dan SDM pelaku perikanan karang di lokasi *pilot activities* di wilayah KMHA sasaran.

5. Kemitraan

Kemitraan ini merupakan upaya untuk menuju kemandiri kelompok ataupun jembatan untuk pendampingan kelompok menuju kemandirian. Meskipun pada konteks tertentu kemitraan ini merupakan capaian akhir dan pembuktian atas kemandirian kelompok. Namun dalam pelaksanaan proyek ini, kemitraan merupakan ujicoba dan prakondisi kelompok menuju kemitraan. Dukungan proyek sangat terbatas waktu dan SDM, untuk itu sinergi untuk penguatan kelompok dicapai melalui kemitraan ini. Meski belum menjadi capaian, harapannya kemitraan ini mampu mendorong lebih cepat upaya kemandirian kelompok dan penguatan kelembagaan.

BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan proyek ini dibagi menjadi 5 capaian atau outcome diantaranya seperti dalam slide berikut ini:



Gambar 2. Outcome Kegiatan Paket 6

Dalam setiap outcome terdapat beberapa capaian indikator yang disesuaikan dengan output yang dirancang sesuai dengan jadwal setiap bulannya. Dalam panduan *Log Frame Analysis* (LFA) yang telah dibuat merupakan kerangka acuan kegiatan atau road map yang dijalankan secara bertahap dan harus tercapai setiap bulannya. Hal itu direkam dalam laporan bulanan, laporan kwartal dan laporan tahunan sebagai monitoring dan evaluasi. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan paket 6, tahapan yang dilakukan mengikuti tahapan dan strategi yang direncanakan dalam LFA, yang perlu dilakukan antara lain:

1. Set up SDM pengelola proyek dan posisi kantor lapangan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat adat baik di tingkat kabupaten dan kampung/desa diperlukan intensitas komunikasi yang cukup tinggi. Di awal proyek penetapan *duty station* kantor lapangan diperlukan untuk

mempermudah jembatan komunikasi para pihak. Untuk kantor lapangan di Raja Ampat di pilih kota Waisai sebagai *fieldbased office* aktivitas kegiatan untuk SAP Raja Ampat.

Sedangkan untuk TNP laut Sawu, di awal diperlukan banyak koordinasi dengan BKKPN Kupang dan DKPP provinsi NTT maka *based* kantor lapangan dipilih kota Kupang. Pada waktu itu BKKPN Kupang Wilker Rote masih belum terbentuk dan baru ada di 2021. Penempatan SDM pengelola proyek juga menggunakan strategi penempatan fasilitator lapang serta CO lokal yang *live in* atau tinggal di sekitar desa lokasi desa dampingan (*pilot site*). Masing-masing desa/kampung didampingi oleh CO lokal yang berfungsi untuk membangun komunikasi dan edukasi terkait pra kondisi untuk pembentukan kelompok dan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan ketika kelompok sudah terbentuk.

2. Monitoring dan evaluasi internal untuk membangun tata hubungan koordinasi dan komunikasi pelaksana proyek di lapangan

Untuk memaksimalkan monitoring dan pengawasan jarak jauh perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi intensif *satu pintu*. Hal ini dijalankan untuk untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan proyek. Sehingga penetapan *job desk* setiap pengelola proyek perlu dimasukkan level kewenangan dan supervisi untuk membangun tata hubungan komunikasi jarak jauh ini sehingga mengurangi adanya *miss communication* dan *miss leading* dalam pelaksanaan kegiatan. Pengaturan koordinasi dan komunikasi internal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Koordinasi yang jelas untuk penyampaian informasi kepada para pihak

Ada beberapa koordinasi yang dilakukan di tingkat lapangan. Penyampaian informasi, sosialisasi kegiatan kepada para pihak di awal kegiatan perlu pemahaman substansi yang utuh di semua fasilitator hingga CO lokal, meskipun kegiatan ini juga baru pertama kali bagi yayasan PILI intensif di lapangan dengan lanskap pesisir dan perairan. Terlebih lagi dengan sistem kerja pengelolaan keuangan melalui DIPA, dengan berbagai kelengkapan administrasi detail sebagai bukti pengeluaran anggaran yang *eligible*.

Jarak Jauh antara dua site TNP laut Sawu dengan lingkup kerja Kupang-Rote serta SAP Raja Ampat, dengan lingkup kerja Wasai-Mutus perlu garis koordinasi yang jelas sehingga capaian output di kawal dan berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui sejak awal untuk mencari solusi sehingga capaian kegiatan bisa terlaksana.

Kemampuan setiap fasilitator dan CO lokal di awal kegiatan cukup beragam, hal ini perlu strategi pengelolaan yang tidak mudah. Tahap penyesuaian kegiatan dan intensitas

capaian yang harus dijalankan setiap bulannya memerlukan koordinasi intensif baik evaluasi bulanan maupun tindak lanjut kegiatan di bulan berikutnya yang disesuaikan dengan indikator capaian output. Setiap bulan diakhir bulan antara tanggal 25-30 dilakukan rapat internal untuk evaluasi capaian kerja bulanan dan perencanaan kegiatan berikutnya.

Setiap kegiatan yang melibatkan para pihak, juga dilakukan secara konsisten sosialisasi terkait prosedur Penanganan Keluhan dan Pengaduan dari waktu ke waktu dan evaluasi penerapannya.

b) Modifikasi pendekatan untuk mencari solusi permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan lapangan tentunya muncul berbagai persoalan. Terlebih saat mulainya program ini masuk dalam pandemi Coronavirus 19 yang cukup menyita banyak anggaran untuk protokol kesehatan (prokes) dan syarat perjalanan. Begitu juga hambatan pertemuan terbatas cukup membuat CO lokal dan fasilitator lapangan kesulitan untuk menetapkan kepastian tanggal kegiatan di tingkat kabupaten maupun kampung dengan izin Satgas. Solusi untuk kegiatan ini, pertemuan terbatas di kampung/desa dengan prokes ketat. Di awal tadinya di perencanaan kegiatan banyak kegiatan pertemuan di tingkat kabupaten, dengan situasi tersebut kegiatan di kabupaten dilakukan *door to door* dan diskusi informal. Di sisi lain, hal positif yang diperoleh adalah kedekatan personil pemangku yang ikut mendorong kegiatan ini menjadi lebih mudah dalam pelaksanaan proyek.

Persoalan kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pertemuan, pembentukan kelompok memerlukan pendekatan yang cukup berbeda dan beragam. Setiap fasilitator punya *interest* tersendiri membangun komunikasi dengan para pihak, sehingga solusi atas permasalahan individu dan kelompok tentunya disesuaikan dengan tingkat permasalahan dan dampak atas permasalahan itu.

Contohnya: budaya '*iri*' yang masih cukup kental di kampung Mutus tentunya perlu pendekatan yang berbeda dengan yang lain. Mengawal konsistensi keputusan kolektif di Mutus menjadi salah satu kunci untuk memompa motivasi personal I dalam kelompok. Jika si A mendapatkan kepercayaan untuk mengakomodir kegiatan musti mendapatkan persetujuan kolektif di kelompok besar dan perlu membentuk tim kerja. Jika ada yang menentang dan tidak setuju di luar forum, maka keputusan awal dianggap tidak bermasalah. Sehingga rencana awal bisa terus berjalan. Bisa jadi dalam perjalanannya si B tidak setuju, sepanjang itu tidak disampaikan terbuka di forum diskusi maka pernyataan si B tidak berlaku. Meskipun timbul tantangan lainnya, kalau si B menjadi

tidak aktif di kelompok. Dan ini perlu pendekatan personal fungsi CO lokal dan Fasilitator memotivasi kembali untuk aktif di kelompok.

Lain halnya dengan di Rote, persoalan kelompok tidak hanya di tingkat personal tetapi kelembagaan. Hal ini tentunya perlu solusi yang berbeda, pendekatan penyelesaian kelembagaan, mendekatkan dengan cara kerja bersama, memetakan peran dan posisi antar lembaga untuk tujuan bersama diperlukan untuk resolusi konflik dalam hal ini. Begitu juga koordinasi lintas lembaga kelompok diperlukan untuk bisa duduk bersama membangun satu tujuan berkembangnya usaha perikanan dalam satu desa.

3. Mengawal Dinamika Capaian Kegiatan dan Penyelesaian Laporan

Kegiatan di lapangan cukup padat dan tenggat waktu yang ketat. Setiap bulan di awal pelaksanaan kegiatan masih soal prakondisi dan kajian persiapan untuk menentukan pilot site dan melihat situasi kebijakan di tingkat kabupaten terkait pengakuan dan perlindungan KMHA.

Outcome 1

Output 1.1: Adanya **dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi** di 2 lokasi
Output 2.1: Tersedianya satu hasil **kajian kelayakan lokasi KMHA**
Output 3.1: Tersedianya satu hasil **kajian tentang tenurial system KMHA** di lokasi pilot activities

Capaian

- ✓SK panitia KMHA di Raja Ampat dan POKJA KMHA SAP Raja Ampat dan mekanisme kerja
- ✓Modul kelayakan kelembagaan dan modul pemetaan partisipatif
- ✓Dokumen kajian Kesiapan kelembagaan adat
- ✓Dokumen Kajian pemetaan Partisipatif **SAP Raja Ampat (Mufus)**



Gambar 3. Outcome 1 Paket 6

Dari peta kegiatan di Outcome 1 tentunya banyak kegiatan yang melibatkan para pihak kunci untuk bisa mengawal rangkaian kegiatan pendampingan ke depan. Target draft Surat Keputusan (SK) Panitia/Pokja KMHA tadinya direncanakan di awal pelaksanaan kegiatan (Q1 dan Q2 tahun 2020). Namun sampai akhir tahun belum terkejar karena proses diskusi para pihak di daerah terkait KMHA masih belum terbiasa.

Raja Ampat misalnya, pembicaraan KMHA masih sangat minim informasi. Melibatkan dua lembaga adat terkait posisi masyarakat di SAP Raja Ampat pun cukup sulit dipertemukan di pertemuan resmi forum KMHA di tingkat kabupaten. Namun dengan intensif pembentukan tim dari dinas yang dipimpin oleh Bappeda Raja Ampat cukup terbukti mampu mengawal lahirnya SK panitia KMHA di Raja Ampat yang terbit pada bulan Agustus 2021 lalu. Diskusi informal para tim kerja saat itu menjadi format cukup intensif membangun pemahaman yang sama dan saling berbagi peran mewujudkan Panitia KMHA ini di tingkat kabupaten.

Untuk Rote, pendekatan di FKTAB atau forum adat cukup intensif dan perlu waktu lama untuk melihat posisi FKTAB di forum tingkat kabupaten. Dukungan untuk memperbesar peran FKTAB di tingkat kabupaten juga dilakukan hingga revitalisasi kelembagaan FKTAB untuk mendukung peran-peran adat dalam diskusi tentang KMHA. Namun tantangan terbesar pendampingan FKTAB di awal karena keputusan sifatnya *hak prerogatif* ketua adat sehingga intervensi keputusan kolektif tidak bisa dilakukan.

Sementara itu, karena kondisi kesehatan ketua adat maka keaktifan beliau mengawal kegiatan hingga tingkat kampung tidak bisa dilakukan dan hanya perwakilan yang tidak punya kewenangan untuk keputusan. Kemudian pendekatan beralih untuk inisiasi di tingkat dinas, dimana Bappelitbangda Rote menjadi *leading sector* untuk proses ini. Saat itu momentumnya pas dengan dikeluarkannya surat edaran kemendagri untuk pembentukan panitia KMHA di tingkat kabupaten, identifikasi dan verifikasi wilayah KMHA di tingkat kabupaten dan menerbitkan dukungan kebijakan KMHA di tingkat kemudian melaporkan di tingkat provinsi dan kementerian. Diskusi awal disambut baik dan langsung dimandatkan kabag hukum kabupaten untuk memulai proses diskusi hingga terbitnya SK Panitia KMHA di bulan Agustus 2021 juga, lebih dulu terbit dibandingkan di Raja Ampat meskipun proses draf masuk jauh lebih awal di Raja Ampat. Dukungan tim kabupaten cukup kondusif dan berjalan baik hingga semangat untuk pengakuan dan perlindungan KMHA benar-benar terealisasi hingga terbitnya PERDA pengaturan kelembagaan adat di Rote dan masih terus berproses.

Outcome 2.

Output 2.1: Tersedianya **draft kajian akademis/naskah akademik** untuk usulan pengakuan dan perlindungan KMHA

Output 2.2.: Tersusunnya **kajian baseline dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan** terhadap pelaksanaan Right-based Fisheries Management (RBFM)

Output 2.3.: Kajian **ekonomi dan biologi di tingkat nasional** yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan input, output and process control untuk sumber daya udang di **WPP 718**

Output 2.4: Tersedianya **kajian bio-ekonomi sederhana** di 3 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM)

Output 2.5: Tersedianya **Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan** berbasis hak (Right-Based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM) di 3 KMHA

Capaian:

- ✓ Dokumen kajian Baseline dan kajian dampak
- ✓ Draft naskah/kajian akademik pengakuan dan perlindungan KMHA di 2 kabupaten
- ✓ Laporan Analisa modelling Biekonomi di WPP 718
- ✓ Dokumen Bioekonomi Sederhana di 3 KMHA
- ✓ Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Hak di (3 KMHA)

Gambar 4. Outcome 2 Paket 6

Outcome 3

Output 3.1: Berkembangnya kemitraan kelompok dampingan

Output 3.2.: Menguatnya kapasitas KMHA dampingan

Output 3.3.: Terimplementasi pengolahan hasil tangkapan serta menguatnya kapasitas kelompok dalam pengolahan hasil tangkapan

Output 3.4: Tersedianya **pembelajaran dari pilot activities** di berupa best management practices (BMPs), 4 buku: *Pengakuan dan perlindungan KMHA, Pengelolaan RBFM, Rencana Pengelolaan Perikanan, Kemitraan.*

Output 3.5. Terlaksananya workshop/lokakarya pembelajaran dan komitmen adopsi BMPS

Capaian:

- ✓ Pendampingan Kelompok dan pemetaan kebutuhan alat untuk pengembangan usaha 8 kelompok raja empat, 4 kelompok di Rote
- ✓ Pengadaan alat dukungan RBFM dan Pengolahan Hasil Perikanan di 6 kelompok di raja empat dan 3 kelompok di Rote
- ✓ Kemitraan dalam pengembangan unit usaha kelompok serta pengawasan: Rote: 4 PKS di Oelua, 4 PKS di Sotimori
- ✓ Buku Pembelajaran: 4 BMP's (**BMP's 1:** Pengakuan dan Perlindungan KMHA, **BMP's 2:**RBFM , **BMP's 3:** RPP berbasis hak, **BMP's 4:** Kemitraan)
- ✓ Laporan workshop diseminasi dan berita acara rekomendasi/komitmen penerapan BMP's\

Gambar 5. Outcome 3 Paket 6

Mengawal kegiatan di Outcome 2 dan 3 simultan dengan pendampingan kelompok dan komunikasi dengan tim kerja dari dinas. Kalau di Raja Ampat, kegiatan di outcome 2 dan 3 selalu dilakukan di dalam kerja tim Pokja KMHA SAP Raja Ampat, sehingga tim inti dari Yayasan PILI, BKKPN Kupang, Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan selalu bekerja bersama ketika turun ke kampung untuk memulai pembentukan kelompok, mengawal kajian hingga membangun kemitraan.

Untuk pendampingan di Rote, dilakukan lebih banyak oleh peran pendamping lokal yang ada di dua desa dengan fasilitator dan asisten fasilitator lapangan. Dua tipe pendekatan yang berbeda ini merupakan langkah yang disesuaikan dengan lokus dan peta stakeholder saat pemetaan partisipatif dilakukan. Hal ini tentunya dikawal *management project* di bawah program manajer untuk melihat dinamika pelaksanaan kegiatan secara berkala.

BAB 4. Catatan Pembelajaran

Dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan tentunya bisa kita tarik beberapa catatan yang kita sebut sebagai tantangan dan pembelajaran. Secara umum tantangan dan pembelajaran ini bisa dilihat dalam slide dibawah ini:



Gambar 6. Tantangan dan Pembelajaran dari Pelaksanaan Paket 6

Adapun untuk dokumen pembelajarn secara rinci sudah ada dalam 4 buku BMP terpisah yang diterbitkan. Sedangkan catatan pembelajaran secara umum bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinamika kelompok dalam penguatan kelembagaan

Salah satu yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan kelembagaan adalah dinamika kelompok. Dari 3 KMHA dampingan yayasan PILI dinamika kelompok cukup beragam. Untuk desa Oelua, dinamika kelompok kenatal dengan perbedaan pendapat anggota atas keputusan pengurus dan juga anggota kelompok. Begitu juga pendampingan kelompok oleh desa, masih kental dengan intervensi kelompok dominan.

Untuk Sotimori, karena kelompok masih dalam satu lembaga meskipun ada 3 divisi, aktivitas utama sebagai petani budidaya rumput laut cukup padat. Namun pertemuan kelompok dan juga penambahan anggota kelompok masih bisa mewadahi lingkaran personal anggota yang cukup satu ide atau gagasan. Konflik perorangan jarang terjadi,

karena kepala desa cukup berperan aktif dalam pembentukan kelompok ini. Sehingga komunikasi dua arah pun lebih mudah dan cukup baik.

Sedangkan untuk kelompok di Mutus, pemahaman kelompok masih berproses meski lebih lambat daripada Rote. Hal ini tentunya pengaruh atas akses informasi dan transportasi anggota masyarakat yang bergabung dengan kelompok lebih terbatas daripada di Rote Ndao. 8 kelompok di Mutus cukup kuat untuk motivasi usaha perikanan, sehingga kerjasama dalam kelompok cukup baik. Perubahan signifikan di kelompok pengolahan hasil perikanan dengan hasil yang sudah bisa dilihat peningkatan dan perbaikan teknik pengeringan dengan alat yang digunakan.

2. Penguatan Kemitraan

Penguatan kemitraan di proyek ini tidak sekedar capaian akhir proyek tetapi jembatan untuk dukungan ke arah kemandirian kelompok. Begitu juga bagi instansi dinas di kabupaten merupakan pintu masuk untuk meneruskan pendampingan terhadap kelompok.

Proses pendampingan kelompok yang kontinyu diperlukan untuk strategi pendekatan kepada kelompok pasca proyek. Selain itu, kelompok bisa mengkomunikasikan kebutuhannya kepada para pihak termasuk dinas-dinas terkait, untuk bisa dimasukkan dalam rencana anggaran yang bisa didukung pemerintah setempat.

3. Dukungan Kebijakan Daerah untuk Praktik RBFM

Dukungan kebijakan daerah untuk praktek RBFM terkait diperlukan untuk memperbanyak akses usaha perikanan kepada masyarakat adat yang belum tergabung dalam kelompok. Pemilihan *pilot site* tentunya tidak bisa dipungkiri pendampingan kelompok ini sangat terbatas. Untuk itu dukungan daerah penting sebagai upaya menyebarkan edukasi dan pemahaman tentang usaha perikanan. Baik disisi ekologis maupun teknis praktik RBFM untuk melindungi sumber daya ikan berkelanjutan.

Selain itu dukungan kebijakan daerah melalui alokasi dana desa untuk membeli produk kelompok pengolahan cukup membantu kelompok secara nyata beroperasi rencana kerja atau rencana pengelolaan perikanan yang sudah disusun. Begitu juga dukungan penguatan peraturan desa atau peraturan kampung di tingkat tapak, cukup diterima baik untuk memayungi pelaksanaan denda adat yang sudah berlaku di dalam

aturan adat/papadak/hohorok yang berlaku di rote maupun peraturan adat yang berlaku di Raja Ampat.

4. Pentingnya Akses dan Pengakuan KMHA dalam Perikanan Berkelanjutan

Pemberian akses dan upaya perlindungan terhadap KMHA penting untuk terus diberikan dukungan. Hal ini seiring dengan proses pengakuan KMHA di tingkat kabupaten. Dokumen pengakuan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di KMHA.

Akses dan perlindungan dalam pembelajaran pelaksanaan kegiatan ini lebih mudah dicapai, namun upaya pengakuan masih memerlukan proses dan perlu dikawal tim panitia KMHA. Salah akses yang bisa diberikan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam forum-forum diskusi di tingkat kabupaten maupun regional sebagai sharing pengetahuan dan pemahaman. Bukti keterlibatan masyarakat adat untuk melestarikan sumber daya alam dan sumber daya ikan di sekitar tempat tinggalnya perlu didukung untuk pemberian akses hingga pengakuan. Karena itu juga mendapat mandat negara untuk melestarikan keragaman budayanya.

BAB 5.

Kesimpulan dan Penutup

Dalam pembelajaran paket 6 yayasan PILI ini ada yang bisa optimal dicapai dan ada yang belum maksimal dalam capaiannya.

Hal yang optimal dicapai sehingga menjadi **catatan sukses** proyek ini antara lain:

1. Membangun kolaborasi para pihak

Dalam memulai kegiatan dan juga membangun tim lapangan pendekatan para pihak kunci diperlukan. Sehingga kerja-kerja bersama di tingkat tapak bisa berlanjut. Meskipun pendekatan dan level koordinasi berbeda antara Rote Ndao dan Raja Ampat, namun kerja-kerja kolaborasi ini cukup sukses untuk menjadi contoh lain di program atau proyek lain kedepannya.

2. Dukungan kebijakan pengakuan dengan terbitnya SK Panitia KMHA

Di kedua kabupaten kegiatan yang menghasilkan produk hukum berupa SK panitia KMHA yang ditandatangani bupati cukup berhasil. Satu tahun pelaksanaan kegiatan ini, kedua SK bisa dihasilkan dengan tim dinas yang berbagi peran mengawal hingga keluarnya keputusan ini. Proses detail di kedua kabupaten juga berbeda langkah dan juga strateginya karena tantangannya juga berbeda, namun capaian yang dihasilkan pada akhirnya cukup baik untuk menjadi kisah sukses.

3. Pembentukan kelompok

Pembentukan kelompok dilakukan di masing-masing desa atau kampung. Pembentukan kelompok diawali dengan proses diskusi pemangku kepentingan dan sudah dilakukan saat kajian pemetaan partisipatif. Pembentukan kelompok juga melihat hasil pemetaan stakeholder dan disosialisasikan sesuai prosedur pembentukan kelompok yang ada di peraturan dinas perikanan. Pembentukan kelompok ini jumlah anggota serta struktur kepengurusan diambil sesuai dengan juklak yang ada, minimal 10 orang dalam satu kelompok dan ada ketua, sekretaris serta bendahara di dalam strukturnya.

Baik di Rote Ndao maupun di Raja Ampat, proses pembentukan kelompok cukup lancar, hanya pemahaman atas pentingnya kelompok masih perlu edukasi dan input pengetahuan soal leadership dan pentingnya kelembagaan kelompok. Seiring dengan itu tentunya dinamika kelompok cukup berjalan baik. Kesesuaian antar individu maupun ketidakcocokan ide pun bisa diselesaikan dengan komunikasi antar personal. Hingga proyek ini berakhir, kelompok masih beraktifitas dengan usaha perikananannya baik budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan maupun pengawasan mandiri.

4. Pendampingan kelompok hingga kemitraan

Proses pendampingan kelompok yang sudah terbentuk sudah melewati masa satu tahun ketika proyek ini berakhir. Hanya saja sebagai komitmen dan tanggung jawab untuk mengawal kemandirian kelompok PILI menerapkan strategi keberlanjutan dengan mengawal kelompok oleh CO lokal satu tahun pasca proyek ini. Selain itu upaya pendampingan kelompok tetap dilakukan rutin dari mulai pembiasaan diskusi bulanan di setiap kelompok dan update progres capaian kinerja kelompok terhadap rencana kerja yang dilakukan.

Pendampingan kelompok ini salah satunya juga melakukan asistensi terkait pembuatan proposal teknis yang dikomunikasikan kepada dinas terkait. Hal ini pembiasaan anggota kelompok untuk meningkatkan level komunikasi dan mengawal motivasi kolektif di kelompok dampingan. Kegiatan ini mesti rutin dilakukan sebagai upaya mitigasi kelompok menjadi pasif karena tidak ada komunikasi intensif diantara anggota. Selain itu, kemitraan juga merupakan jembatan kelompok dalam melaporkan capaian-capaian usaha perikanan yang dilakukan untuk mendapatkan perbaikan teknis dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Selain upaya optimal, tentunya dengan banyak keterbatasan ruang atau jarak antar lokasi yang didampingi dan juga batas waktu kurang lebih 20 bulan atas dukungan proyek ini, ada juga hal-hal yang **kurang optimal**. Adapun catatan yang kurang optimal dalam capaian proyek ini diantaranya:

1. Proses pengakuan KMHA di Kabupaten Raja Ampat

Pendampingan dalam menggulirkan proses pengakuan di Raja Ampat masih butuh waktu yang cukup lama. Diskusi peran aktif panitia KMHA harus terhenti karena proses pergantian jabatan kepala dinas di beberapa instansi. Dan ini tentunya mengulang dari awal proses pemahaman bersama terhadap upaya-upaya pengakuan dan perlindungan KMHA di Raja Ampat. Ada kurang lebih 4 kepala dinas berganti yang tadinya mengawal dan menjadi tim bersama di pembentukan KMHA. Tentunya ini perlu memebangun komunikasi ulang dan tata koordinasi dari awal untuk bisa berbagi peran kembali dalam upaya pengakuan KMHA di Raja Ampat.

Dari tahapan proses pengakuan dan perlindungan di Kabupaten Raja Ampat masih sebatas identifikasi wilayah adat di SAP Raja Ampat. Masih ada lima kampung lagi yang perlu pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi areal mencari di ruang laut SAP Raja Ampat. Tahapan selanjutnya mestinya penetapan wilayah KMHA di Raja Ampat dan dukungan kebijakan berupa PERDA pengaturan kelembagaan adat ataupun perlindungan KMHA di Raja Ampat.

2. Mekanisme reward untuk kelompok kurang tepat di tengah program

Dalam proyek ini ada dukungan pemberian bantuan alat pendukung, hanya saja proses pemberian alat ini belum seiring dengan penguatan kelembagaan kelompok. Sehingga proses dinilai kurang tepat. Mestinya penguatan kelembagaan berjalan dan muncul inisiatif baru diberikan reward atas dukungan alat kepada anggota kelompok. Sehingga motivasi personal bergabung dalam kelompok tidak terpecah dengan adanya penerimaan bantuan alat. Hal ini tidak bisa dihindari karena durasi program sangat pendek dan menjadi capaian indikator yang harus terpenuhi ketika proyek ini selesai dikerjakan. Kedepannya, perlu memperhitungkan tata waktu prakondisi kelompok hingga benar-benar siap diberikan reward berupa bantuan alat pendukung.

Harapan ke depan, upaya perencanaan hingga tahap berakhirnya proyek bisa berisi roadmap pemberdayaan yang lebih baik lagi. Begitu juga dukungan para pihak dalam pemberian akses, perlindungan dan upaya pengakuan KMHA di daerah.